

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

# **RENCANA KERJA (RENJA) 2022**

**P L A N N I N G**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan Daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan Daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit Organisasi Pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut: Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone 2022 :

- a. Berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone merupakan penjabaran dari program yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra). Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. Tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone beserta sasaran satuan kerja lain, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bone. Sehingga tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Bone.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2022 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Menengah daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 359);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 56 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 56);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 30);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone adalah sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program dan kegiatan pelayanan perijinan di Kabupaten Bone dalam kurun waktu satu tahun;
2. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan Komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang pelayanan perijinan yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Bone.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun – tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan / atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Pokok – pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

## **2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu h;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK,SPM dan SDGs (suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

#### **2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah.

### **3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

## **Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **Bab V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah – kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut
4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah beserta nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

**BAB II**

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN LALU**

---

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Untuk Mengukur Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone selama tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

**A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

**B. Capaian Analisis Kinerja** Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

**Evaluasi Program Tahun 2020**

Anggaran Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dengan APBD (murni) sebesar Rp 6.097.857.701,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp 5.487.477.416,- terdiri dari 10 Program dan 36 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 99,39% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99,63%. Dengan rincian realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.1**  
**Realisasi Fisik dan Keuangan Program / Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (DPPA)	REALISASI		
			KEUANGAN	KEU (%)	FISIK (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 772.303.600	Rp 766.171.447	99,21%	100,00%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Rp 135.720.000	132.069.293	97,31%	100,00%
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 39.786.432	37.524.416	94,31%	100,00%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 10.237.000	10.237.000	100,00%	100,00%
4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 37.440.000	37.440.000	100,00%	100,00%
5	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Rp 191.374.268	191.154.838	99,89%	100,00%
6	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp 357.745.900	357.745.900	100,00%	100,00%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 163.750.000	Rp 161.390.053	98,56%	4,00%
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 37.200.000	37.200.000	100,00%	100,00%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 85.000.000	82.640.053	97,22%	100,00%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 41.550.000	41.550.000	100,00%	100,00%
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 34.500.000	Rp 34.500.000	100%	100%
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Rp 34.500.000	34.500.000	100,00%	100,00%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (DPPA)	REALISASI		
			KEUANGAN	KEU (%)	FISIK (%)
IV	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Rp 90.486.300	Rp 90.060.300	100%	100%
1	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Rp 70.046.300	69.620.300	<u>99,39%</u>	<u>100,00%</u>
2	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Rp 20.440.000	20.440.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
V	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	Rp 870.000	Rp 870.000	100%	100%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 870.000	870.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
V	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	Rp 5.925.000	Rp 5.925.000	100%	100%
1	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Rp 1.725.000	1.725.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
2	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Rp 4.200.000	4.200.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
VI	<b>Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	Rp 11.052.100	Rp 11.052.100	100%	100%
2	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Rp 4.950.000	4.950.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
4	Penyelenggaraan pameran investasi	Rp 6.102.100	6.102.100	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
VIII	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100%	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (DPPA)	REALISASI		
			KEUANGAN	KEU (%)	FISIK (%)
1	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	Rp 5.000.000	5.000.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
IX	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Rp 691.113.000</b>	<b>Rp 689.123.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan	Rp 95.300.000	95.300.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
2	Pelayanan administrasi perizinan	Rp 81.475.000	81.475.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
3	Penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pelayanan Perizinan	Rp 3.700.000	3.700.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
4	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan perizinan	Rp 7.699.500	7.679.500	<u>99,74%</u>	<u>100,00%</u>
5	Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan	Rp 93.750.000,00	93.250.000	<u>99,47%</u>	<u>100,00%</u>
6	Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan	Rp 354.250.000,00	354.250.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
7	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Rp 41.588.500,00	40.838.500	<u>98,20%</u>	<u>100,00%</u>
8	Penanganan Pengaduan Pelayanan	Rp 13.350.000,00	12.630.000	<u>94,61%</u>	<u>100,00%</u>

**Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021**

Sedangkan untuk Tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2021 dengan usulan sebesar Rp. 6.391.524.001,- terurai dalam 6 program, 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

### **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.

### **Sarana Kerja dan Perlengkapan**

Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone namun masih ada beberapa sarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan beberapa kegiatan.

### **Anggaran**

Dengan adanya refocusing anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

### **Sistim Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL)**

Pada tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone bekerjasama dengan pihak ketiga telah membuat sebuah aplikasi Sistim Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL) yang dapat memudahkan dalam proses Pelayanan Perizinan. Permasalahan disini adalah kurang mampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, ke depan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai.

**Tabel 2.1.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2020**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone**

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = 10/4)
1	<b>URUSAN WAJIB</b>									
01.16	<b>Penanaman Modal</b>								-	
01.16.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
1.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Rek telepon, TV Kabel dan Listrik (Rekening)	180		36	36		36	72	40%
1.16.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga/Aparat Pengelola Keuangan yang mendapat jasa adm keuangan selama setahun (orang)	2820		564	564		564	1.128	40%
1.16.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pengadaan alat kebersihan yang tersedia (Jenis)	98		18	18		10	28	29%
		Jumlah Jasa Kebrsihan selama setahun (kali)	60		12	12		12	24	40%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2018 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = 10/4)
1.16.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	828		156	156		156	312	38%
		Jumlah pembayaran media yang menayangkan iklan (kali)	120		24	24		24	48	40%
1.16.01.23	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi ketingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten yang diikuti (kali)	680		60	60		41	101	15%
1.16.01.24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (paket)	180		36	36		36	72	40%
01.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (persen)								
1.16.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	1		1	0		-	-	0%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2018 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = 10/4)
1.16.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional (unit)	10		-	0		-	-	0%
1.16.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)	14		-	0			-	0%
1.16.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor (unit)	39		6	12		10	22	56%
1.16.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadan Mebeleur (unit)	28		-	0		-	-	0%
1.16.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pmeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	4		0	0		-	-	0%
1.16.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / operasional (paket)	113		17	34		16	50	44%
1.16.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor (unit)	218		37	74		16	90	41%
1.16.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor (unit)	398		74	148		-	148	37%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = 10/4)
1.16.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Pemeliharaan Mebeleur (unit)	82		17	0		-	-	0%
01.16.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur</b>								
1.16.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	183		0	0		73	73	40%
01.16.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Presentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (persen)</b>								
1.16.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Formal (orang)	7		1	1		-	1	14%
1.16.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi ke kecamatan (Kegiatan)	5		1	1		1	2	40%
1.16.05.03	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis (orang)	39		5	5		4	9	23%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2018 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = 10/4)
01.16.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	<b>Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (persen)</b>								
1.16.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (laporan)	15		3	3		3	6	40%
1.16.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran (laporan)	8		0	0		-	-	0%
1.16.05.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (laporan)	4		0	0		-	-	0%
01.16.08	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (persen)</b>			0					
1.16.08.01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun (dokumen)	27		6	6		2	8	30%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2018 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = 10/4)
1.16.08.02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Website yang dikembangkan oleh DPMPTSP (paket)	5		1	1		1	2	40%
<b>01.16.15</b>	<b>Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Jumlah Investor Penanaman Modal (Investor)</b>			0					
01.16.15.06	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah Dokumen kerjasama yang diterbitkan (dokumen)	12		1	1		-	1	8%
01.16.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM (Kegiatan)	300		40	40		4	44	15%
01.16.15.09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah peserta yang mengikuti Workshop (Orang)	500		100	100		-	100	20%
01.16.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti (kegiatan)	22		4	4		4	8	36%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2018 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = 10/4)
01.16.16	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Jumlah Nilai Realisasi Investasi (Milyar)</b>								
1.16.16.04	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Data Potensi yang dilaporkan dalam sistem informasi Penanaman Modal (Dokumen)	16		0	0		-	-	0%
01.16.16.11	Perencanaan dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Regulasi Pemberian Insentif PM dan Hasil Evaluasi Implementasi Regulasi Pemberian Insentif (Dokumen)	5		1	1		1	2	40%
01.16.16.12	Peningkatan pelayanan Investasi	Jumlah Dokumen SOP layanan Investasi (Dokumen)	5		1	1		1	2	40%
01.16.17	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>	<b>Presentase ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi (persen)</b>								

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2018 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = 10/4)
1.16.17.01	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan evaluasi RUPM (dokumen)	5		1	1		1	2	40%
1.16.17.02	Penyusunan Data Peluang Investasi	Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi (Buku)	5		1	1		-	1	20%
01.16.18	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Presentase Jumlah Dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur</b>								
1.16.18.01	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan	Jumlah Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (izin)	8500		1500	4518		1600	6.118	72%
1.16.18.02	Pelayanan administrasi perizinan	Jumlah izin non retribusi yang diterbitkan (izin)	37400		7000	8654		7200	15.854	42%
1.16.18.03	Penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (Dokumen)	5		1	1		1	2	40%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2018 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = 10/4)
1.16.18.04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan perizinan	Jumlah dokumen hasil Monev penyeleggaraan perizinan (dokumen)	5		1	1		1	2	40%
1.16.18.05	Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (Dokumen)	16		4	1		1	2	13%
1.16.18.06	Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan	Jumlah izin terbit yang diarsipkan (izin)	37400		7000	8654		7200	15.854	42%
1.16.18.07	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Dokumen)	5		1	1		1	2	40%
1.16.18.08	Penanganan Pengaduan Pelayanan	Jumlah laporan data layanan informasi perizinan dan kasus penanganan pengaduan (laporan)	5		1	1		1	2	40%
1.16.18.09	Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan	Jumlah Dokumen Perubahan Regulasi Perizinan (Dokumen)	15		7	7		-	7	47%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penggabungan antara penyelenggara PTSP yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dengan Kantor Promosi Penanaman Modal (KPPM). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dalam hal melaksanakan pelayanannya senantiasa berpedoman pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur, dengan tujuan adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, serta sebagai panduan bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya. Izin yang dikelola oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sejak terbitnya Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang penyederhaan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bone adalah sebanyak 17 izin + 1 izin Penanaman Modal.

Proses pelayanan perizinan dapat dilakukan secara paralel/simultan dengan adanya Tim Teknis yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan perizinan yang terkoordinasi, terarah, dan tepat sasaran. Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) terdiri dari Unsur SKPD Teknis terkait perizinan dan juga Unsur DPMPSTSP yang bertugas antara lain :

1. Memberikan kajian teknis terhadap pemrosesan perizinan;
2. Memberikan rekomendasi disetujui / ditolak untuk diterbitkan izin.
3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan.

Sejak Tahun 2016 proses pelayanan perizinan pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menggunakan aplikasi on line melalui website ***www.bp2t\_bone.id*** dan ditahun 2017 berubah nama menjadi ***www.dpmpstsp.bone.go.id*** dan sms gateway dimana dalam aplikasi ini masyarakat dapat mengakses informasi tentang kegiatan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pendaftaran izin secara online, perhitungan retribusi IMB, tracking dokumen serta masyarakat dapat mendownload permohonan izin.

Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone didasarkan pada *review* pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

**Tabel 2.1.3**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Satu Pintu**

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		<b>Presentase Jumlah Dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur</b>		70	75	75		70			
			Jumlah dokumen hasil Monev penyeleggaraan perizinan (dok)		1	1	1		1			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (Dok)		0	4	4		0			
			Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Dok)		1	1	1		1			
			Jumlah laporan data layanan informasi perizinan dan kasus penanganan pengaduan (laporan)		1	1	1		1			
2	Persentase Rumah Ber-IMB		<b>Presentase Jumlah Dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur</b>		70	75	75		70			
			Jumlah Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (izin)		3500	1500	1600		3500			
3	Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha		<b>Presentase Jumlah Dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur</b>		70	75	75		70			
			Jumlah izin non retribusi yang diterbitkan (izin)		6000	7000	7200		6000			
			Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (Dok)		1	1	1		1			
			Jumlah izin terbit yang diarsipkan (izin)		6000	7000	7200		6000			
			Jumlah Dokumen Perubahan Regulasi Perizinan (Dok)		0	7	2		0			
4	Nilai PMDN / PMA per tahun		<b>Jumlah Investor Penanaman Modal (Investor)</b>		43	50	60		43			
			Jumlah Dokumen kerjasama yang diterbitkan (dokumen)		0	1	2		0			
			Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM (Kegiatan)		6	40	50		6			
			Jumlah peserta yang mengikuti Workshop (Orang)		100	100	100		100			
			Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti (kegiatan)		4	4	4		4			

			Jumlah Nilai Realisasi Investasi (Milyar)		135.925	150	175		135.925			
			Jumlah Dokumen Regulasi Pemberian Insentif PM dan Hasil Evauasi Implementasi Regulasi Pemberian Insentif (Dokumen)		0	1	1		0			
			Jumlah Dokumen SOP layanan Investasi (Dokumen)		0	1	1		0			
			Jumlah Dokumen Data Potensi yang dilaporkan dalam sistem informasi Penanaman Modal (Dokumen)		0	4	4		0			
			Presentase ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi (persen)		5	65	75		5			
			Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan valuasi RUPM (dokumen)		1	1	1		1			
			Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi (Buku)		1	1	1		1			

### 2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

#### a. Isu Internal

##### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

- Inovasi-inovasi dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
- Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal untuk pencapaian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bone;
- Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

##### 2. Sumber Daya Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

##### 3. Sarana dan Prasarana

- Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan pelayanan yang lebih baik dalam menunjang peningkatan Iklim Investasi.

- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
- Pemeliharaan Sistem Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL) dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang bertindak sebagai admin maupun operator agar terdapat ketepatan, kesesuaian dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan peraturan yang ada dan berlaku.

#### **4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah**

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Bone menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

#### **b. Isu Eksternal**

##### **1). Globalisasi**

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual).

##### **2). Peraturan Perundang-Undangan**

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan *good governance* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

#### **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

- ♦ Belum Tersedianya Data Base Investasi dan Regulasi Insentif Penanaman Modal;
- ♦ Ketepatan Jangka Waktu Penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan belum sesuai SOP.
- ♦ Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal;
- ♦ Masih kurangnya dukungan kebijakan maupun regulasi terhadap kegiatan promosi guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bone;
- ♦ Masih rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan Investasi dan Penanaman Modal;
- ♦ Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal;
- ♦ Secara kuantitas maupun kualitas kerjasama dalam pengembangan investasi dan penanaman modal masih belum sesuai harapan;
- ♦ Terbatasnya kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- ♦ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat izin baik berupa surat Izin Mendirikan Bangunan maupun surat surat izin lainnya yang wajib dimiliki;
- ♦ Masih adanya masyarakat yang memakai jasa calo untuk penerbitan surat izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan;

### **Dampak**

Belum adanya regulasi Insentif Penanaman Modal sangat berpengaruh terhadap peningkatan Ikim Investasi sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga Perangkat Daerah baik vertikal maupun horizontal. Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang telah dikeluarkan sebagai produk dari Bappeda sebagai institusi perencana.

### **Tantangan dan Peluang**

#### **Tantangan**

1. Kebutuhan akan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan transparan sebagai perwujudan *good governance*.
2. Belum adanya Data peta investasi dan perizinan yang akurat.

#### **Peluang**

1. Pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan;
2. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
3. Adanya Sistem Informasi Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL);
4. Penyelenggaraan perizinan Satu Pintu;
5. Potensi wilayah yang memadai untuk mendatangkan investor;

Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat isu-isu strategis yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan harus segera ditindaklanjuti yaitu ;

1. Data potensi investasi yang tidak lengkap.
2. Perlu diadakan pelatihan – pelatihan bagi tenaga teknis / bidang pelayanan publik secara terprogram / terencana.
3. Perlunya fungsi pengawasan langsung yang lebih baik terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
4. Perlunya sosialisasi secara terpadu untuk menanamkan kesadaran bagi masyarakat tentang aturan / prosedur yang berlaku
5. Perlu ditingkatkannya sarana prasarana terutama yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan kepada masyarakat serta pelaksanaan kegiatan kedinasan secara umum
6. Area Gedung/Kantor harus luas, nyaman dan aman
7. Di tambahnya staf bagi tenaga teknis / bidang pelayanan publik secara terprogram / terencana.

Dalam menyikapi isu isu diatas, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu menempuh beberapa hal diantaranya yaitu melaksanakan pelatihan bagi aparatur dalam hal penggunaan aplikasi perizinan, melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan tentang perizinan dan penanaman modal serta pembuatan RUPM dan Video Profil Potensi invetasi Kabupaten Bone serta keikutsertaan dalam kegiatan Promosi investasi dalam hal ini pameran.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		Jumlah Rek telepon, TV Kabel (Rekening)	36	132.792.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		Jumlah Rek telepon, TV Kabel (Rekening)	36	132.792.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Tenaga/Aparat Pengelola Keuangan yang mendapat jasa adm keuangan (orang)	47	37.897.200	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Tenaga/Aparat Pengelola Keuangan yang mendapat jasa adm keuangan (orang)	47	37.897.200	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah jenis alat kebersihan yang tersedia (Jenis)	20	9.023.300	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah jenis alat kebersihan yang tersedia (Jenis)	20	9.023.300	
			Jumlah Tenaga Kebersihan yang mendapat Jasa/Upah Kerja (Orang)	1	6.600.000			Jumlah Tenaga Kebersihan yang mendapat Jasa/Upah Kerja (Orang)	1	6.600.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah media bahan bacaan yang tersedia (jenis)	13	14.630.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah media bahan bacaan yang tersedia (jenis)	13	14.630.000	
			Jumlah media yang menayangkan iklan (Jenis)	2	26.400.000			Jumlah media yang menayangkan iklan (Jenis)	2	26.400.000	
	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah		Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka koordinasi dan konsultasi (kali)	75	325.000.000	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah		Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka koordinasi dan konsultasi (kali)	75	325.000.000	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		Jumlah Jenis pendukung Pelaksanaan Administrasi (jenis)	3	271.113.040	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		Jumlah Jenis pendukung Pelaksanaan Administrasi (jenis)	3	271.113.040	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (persen)</b>	100		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (persen)</b>	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional (unit)	2 Kendaraan Roda 4, 2 Kendaraan Roda 2	650.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional (unit)	2 Kendaraan Roda 4, 2 Kendaraan Roda 2	650.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	3	15.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	3	15.000.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15	150.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15	150.000.000	
	Pengadaan Mebeleur		Jumlah Pengadan Mebeleur (unit)	20	150.000.000	Pengadaan Mebeleur		Jumlah Pengadan Mebeleur (unit)	20	150.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor diperbaiki (unit)	1	100.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor diperbaiki (unit)	1	100.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara secara rutin (unit)	17	127.897.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara secara rutin (unit)	17	127.897.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin (unit)	40	47.355.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin (unit)	40	47.355.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin (unit)	77	47.355.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin (unit)	77	47.355.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Jumlah Mebeleur yang dipelihara secara rutin (unit)	20	20.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Jumlah Mebeleur yang dipelihara secara rutin (unit)	20	20.000.000	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin aparatur (persen)</b>	<b>100</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin aparatur (persen)</b>	<b>100</b>		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (pasang)	73	75.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (pasang)	73	75.000.000	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Presentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (persen)</b>	<b>100</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Presentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (persen)</b>	<b>100</b>		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Formal (orang)	2	44.250.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Formal (orang)	2	44.250.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		Jumlah Kecamatan pelaksanaan Sosialisasi (Kecamatan)	6	62.242.400	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		Jumlah Kecamatan pelaksanaan Sosialisasi (Kecamatan)	6	62.242.400	
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Tekhnis (orang)	12	75.000.000	Bimbingan tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Tekhnis (orang)	12	75.000.000	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>		<b>Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (persen)</b>	<b>100</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>		<b>Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (persen)</b>	<b>100</b>		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	4	10.362.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	4	10.362.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	1	15.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	1	15.000.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	2	15.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	2	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>		<b>Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (persen)</b>	<b>100</b>		<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>		<b>Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (persen)</b>	<b>100</b>		
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun (dok)	6	36.102.000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun (dok)	6	36.102.000	
	Pengelolaan Website Perangkat Daerah		Jumlah Website yang dikembangkan oleh DPMPTSP (paket)	1	29.419.500	Pengelolaan Website Perangkat Daerah		Jumlah Website yang dikembangkan oleh DPMPTSP (paket)	1	29.419.500	
	<b>Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		<b>Jumlah Investor Penanaman Modal (Investor)</b>	<b>60</b>		<b>Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		<b>Jumlah Investor Penanaman Modal (Investor)</b>	<b>60</b>		
	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha		Jumlah Dokumen kerjasama yang diterbitkan (dokumen)	2	29.905.700	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha		Jumlah Dokumen kerjasama yang diterbitkan (dokumen)	2	29.905.700	
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM (Kegiatan)	50	22.500.500	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM (Kegiatan)	50	22.500.500	
	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi		Jumlah peserta yang mengikuti Workshop (Orang)	100	36.751.000	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi		Jumlah peserta yang mengikuti Workshop (Orang)	100	36.751.000	
	Penyelenggaraan pameran investasi		Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti (kegiatan)	4	280.667.420	Penyelenggaraan pameran investasi		Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti (kegiatan)	4	280.667.420	
	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>		<b>Jumlah Nilai Realisasi Investasi (Milyar)</b>	<b>175</b>		<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>		<b>Jumlah Nilai Realisasi Investasi (Milyar)</b>	<b>175</b>		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Regulasi Pemberian Insentif PM dan Hasil Evauasi Implementasi Regulasi Pemberian Insentif (Dokumen)	1	16.620.450	Perencanaan dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Regulasi Pemberian Insentif PM dan Hasil Evauasi Implementasi Regulasi Pemberian Insentif (Dokumen)	1	16.620.450	
	Peningkatan pelayanan Investasi		Jumlah Dokumen SOP layanan Investasi (Dokumen)	1	18.320.170	Peningkatan pelayanan Investasi		Jumlah Dokumen SOP layanan Investasi (Dokumen)	1	18.320.170	
	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Data Potensi yang dilaporkan dalam sistem informasi Penanaman Modal (Dokumen)	4	25.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Data Potensi yang dilaporkan dalam sistem informasi Penanaman Modal (Dokumen)	4	25.000.000	
	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>		<b>Presentase ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi (persen)</b>	<b>75</b>		<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>		<b>Presentase ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi (persen)</b>	<b>75</b>		
	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi		Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan valuasi RUPM (dokumen)	1	31.442.290	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi		Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan valuasi RUPM (dokumen)	1	31.442.290	
	Penyusunan Data Peluang Investasi		Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi (Buku)	1	15.829.000	Penyusunan Data Peluang Investasi		Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi (Buku)	1	15.829.000	
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>		<b>Presentase Jumlah Dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur</b>	<b>75</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>		<b>Presentase Jumlah Dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur</b>	<b>75</b>		
	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan		Jumlah Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (izin)	1600	115.993.900	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan		Jumlah Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (izin)	1600	115.993.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan administrasi perizinan		Jumlah izin non retribusi yang diterbitkan (izin)	7200	113.476.750	Pelayanan administrasi perizinan		Jumlah izin non retribusi yang diterbitkan (izin)	7200	113.476.750	
	Penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pelayanan Perizinan		Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (Dok)	1	5.197.390	Penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pelayanan Perizinan		Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (Dok)	1	5.197.390	
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan perizinan		Jumlah izin terbit yang diarsipkan (izin)	7200	436.437.980	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan perizinan		Jumlah izin terbit yang diarsipkan (izin)	7200	436.437.980	
	Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan		Jumlah Dokumen Perubahan Regulasi Perizinan (Dok)	2	96.305.000	Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan		Jumlah Dokumen Perubahan Regulasi Perizinan (Dok)	2	96.305.000	
	Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan		Jumlah dokumen hasil Monev penyelenggaraan perizinan (dok)	1	43.553.510	Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan		Jumlah dokumen hasil Monev penyelenggaraan perizinan (dok)	1	43.553.510	
	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (Dok)	4	103.939.880	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (Dok)	4	103.939.880	
	Penanganan Pengaduan Pelayanan		Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Dok)	1	15.714.710	Penanganan Pengaduan Pelayanan		Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Dok)	1	15.714.710	
	Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan		Jumlah laporan data layanan informasi perizinan dan kasus penanganan pengaduan (laporan)	1	96.305.000	Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan		Jumlah laporan data layanan informasi perizinan dan kasus penanganan pengaduan (laporan)	1	96.305.000	

## **2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone belum secara langsung terlibat dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hingga saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kab. Bone belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholder eksternal untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **BAB III**

# **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

---

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas Penanaman Modal, Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Insentif yang dimaksud adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada Penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah dan Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal, pengendalian penanaman modal adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam rangka mendukung prioritas nasional ketiga sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif maka diperlukan upaya untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Penanaman Modal Hasil Pemetaan, Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota peningkatan penyelenggaraan penanaman modal. Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal, selanjutnya dalam Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun Tahun 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tsb, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan

hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

**3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki tujuan :

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Meningkatkan nilai investasi penanaman modal di Kabupaten Bone

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
- Presentase Peningkatan Investasi

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yaitu :

- Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Meningkatnya Daya tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone.

Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Nilai PMA/PMDN

**Tabel 3.1.1**  
**Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
I	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP
II		Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat
III	Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone		Presentase Peningkatan Investasi
IV		Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk implementasikan program dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi misi Kabupaten Bone, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih menitikberatkan pada hal peningkatan promosi dan pengembangan potensi dan produk unggulan daerah melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, serta Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yang akan diselenggarakan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Program Utama

- 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2. Program Promosi Penanaman Modal
- 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Penunjang

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Pelayanan Penanaman Modal

Tabel 3.1.2  
Uraian Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program Prioritas Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
III	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

**Tabel 3.1.3**  
**Uraian Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program Penunjang Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

NO	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Jumlah Rekening Telepon/WiFi dan TV Kabel	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NO	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
II	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
			Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

---

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Tahun 2022 merencanakan 6 (enam) Program serta 13 (tiga belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan dengan perincinan sebagai berikut:

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

#### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

#### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

#### **c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
- Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

#### **d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Peneyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Peneyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD;

#### **e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

#### **f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### **g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### **2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

#### **A. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota;**

- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal

**B. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;**

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota

**3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL :**

**A. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota

**4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL :**

**A. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

**5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

**A. Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**

- Pengolahan, penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

**6. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

**A. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
- Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

Secara lengkap, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023, beserta kebutuhan dana indikatif dan sumbernya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	5	6							
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	5.125.301.660	APBD Kabupaten		100%	5.637.831.826
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	1.617.250	APBD Kabupaten		100%	1.778.975
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2	1.617.250	APBD Kabupaten		2	1.778.975
		Jumlah Dokumen Renstra dan Perubahan Renstra yang disusun dan ditetapkan	Kecamatan Tanete Riattang Barat		-			0	-
		Jumlah Peserta Forum PD	Kecamatan Tanete Riattang Barat	30	-			30	-
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat waktu	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	3.511.336.790	APBD Kabupaten		100	3.862.470.469
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12	3.511.336.790	APBD Kabupaten		12 Bulan	3.862.470.469

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	103.024.650	APBD Kabupaten		100	113.327.115
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tersedia	Kecamatan Tanete Riattang Barat	79	7.500.000	APBD Kabupaten		34	8.250.000
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN laki laki yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	22.125.000	APBD Kabupaten		1	24.337.500
		Jumlah ASN perempuan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal						1	-
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan (orsi peserta 50% Laki-laki dan 50% Perempuan)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	62.399.650	APBD Kabupaten		100	68.639.615
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	Kecamatan Tanete Riattang Barat	14	11.000.000	APBD Kabupaten		15	12.100.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	758.185.630	APBD Kabupaten		100	834.004.193
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Tanete Riattang Barat	36	68.875.100	APBD Kabupaten		36	75.762.610

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	4.683.280	APBD Kabupaten		1	5.151.608
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12	243.451.000	APBD Kabupaten		1	267.796.100
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kecamatan Tanete Riattang Barat	24	26.836.250	APBD Kabupaten		2	29.519.875
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Media Bahan Bacaan yang tersedia	Kecamatan Tanete Riattang Barat	180	39.840.000	APBD Kabupaten		192	43.824.000
		Jumlah Media yang Menayangkan Iklan		24				24	-
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	Kecamatan Tanete Riattang Barat	170	354.500.000	APBD Kabupaten		176	389.950.000
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan berbasis	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	20.000.000	APBD Kabupaten		1	22.000.000
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	30.695.700	APBD Kabupaten		100	33.765.270
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Kecamatan Tanete Riattang Barat	15	3.798.000	APBD Kabupaten		25	4.177.800
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tanete Riattang Barat	25	26.897.700	APBD Kabupaten		35	29.587.470

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	616.614.000	APBD Kabupaten		100	678.275.400
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon/WiFi dan TV Kabel	Kecamatan Tanete Riattang Barat	36	144.840.000	APBD Kabupaten		36	159.324.000
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tanete Riattang Barat	735	471.774.000	APBD Kabupaten		735	518.951.400
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	103.827.640	APBD Kabupaten		100	114.210.404
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	25	70.287.640	APBD Kabupaten		27	77.316.404
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kecamatan Tanete Riattang Barat	87	33.540.000	APBD Kabupaten		87	36.894.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Ketepatan waktu penerbitan izin sesuai SOP	Kecamatan Tanete Riattang Barat	85	660.825.000	APBD Kabupaten		90	726.907.500
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	7700	660.825.000	APBD Kabupaten		8000	726.907.500

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (izin)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1700	358.930.000	APBD Kabupaten		1900	394.823.000
		Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (Dok)		1				1	-
		Jumlah izin terbit yang diarsipkan (izin)		7700				8000	-
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil Monev penyelenggaraan perizinan (dok)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	4	217.500.000	APBD Kabupaten		1	239.250.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (Dok)		1				1	-
		Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Dok)		1				1	-

KODE	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Laporan Layanan Konsultasi	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	84.395.000	APBD Kabupaten		4	92.834.500
		Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan yang telah ditindaklanjuti		4				4	-
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	21	37.290.000	APBD Kabupaten		18	41.019.000
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Investor yang mendapatkan pemberian fasilitasi/Insentif yang menjadi kewenangan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	17.605.000	APBD Kabupaten		100%	19.365.500
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Regulasi Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	17.605.000	APBD Kabupaten		1	19.365.500
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Presentase wilayah Kabupaten Bone yang telah disusun kedalam peta potensi investasi	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	19.685.000	APBD Kabupaten		100	21.653.500
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan RUPM	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	13.610.000	APBD Kabupaten		1	14.971.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	6.075.000	APBD Kabupaten		1	6.682.500
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Peningkatan Jumlah Investor Penanaman Modal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	15	291.985.000	APBD Kabupaten		20	321.183.500
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Investor Penanaman Modal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	150	291.985.000	APBD Kabupaten		200	321.183.500
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen kerjasama yang diterbitkan (dokumen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	3	19.585.000	APBD Kabupaten		3	21.543.500
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti (kegiatan)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	4	272.400.000	APBD Kabupaten		4	299.640.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase Perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	50	244.881.830	APBD Kabupaten		65%	269.370.013
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	Kecamatan Tanete Riattang Barat	75	244.881.830	APBD Kabupaten		85	269.370.013
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Pemantauan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	62.476.350	APBD Kabupaten		1	68.723.985

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2	120.687.680	APBD Kabupaten		2	132.756.448
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	61.717.800	APBD Kabupaten		1	67.889.580
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi (persen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	85	39.302.000	APBD Kabupaten		90	43.232.200
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Lembaga lainnya yang terintegrasi dengan sistem informasi perizinan berusaha	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	39.302.000	APBD Kabupaten		1	43.232.200
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang dikelola/dikembangkan/dibangun	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	39.302.000	APBD Kabupaten		1	43.232.200
					6.399.585.490				7.039.544.039

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022, secara sinergitas dan terintegrasi. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Bidang dan Sekretariat, Sub Bagian Perencanaan dan Program menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja Tahun 2022.
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2022, Renja Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2022, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas, melalui Sub Bagian Perencanaan dan Program serta Sub Bagian Keuangan.
4. Secara proaktif, Sub Bagian Perencanaan dan Program, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan Renja Tahun 2022 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas.
5. Pada akhir tahun anggaran 2022, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2022, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sub Bagian Perencanaan dan Program serta Sub Bagian Keuangan.
6. Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kegiatan perencanaan dan penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dengan indikator penyusunan dokumen regulasi pemberian insentif / kemudahan kepada penanam modal dan kegiatan pengembangan system informasi penanaman modal merupakan dua kegiatan prioritas pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022, dalam kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai investasi dan mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien transparan dan akuntabel.